

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BREBES DALAM PERBUP BREBES NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

MAHENDRA KUSUMA WARDANA
20103070023

PEMBIMBING:

Dr. H. M.NUR, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang beragam. Namun, optimalisasi potensi tersebut menjadi krusial dalam rangka meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat dapat membatasi ruang gerak fiskal daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menyadari pentingnya merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan PAD. Sebagai wujud perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terarah, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Brebes, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD, serta observasi dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan laporan implementasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, efisiensi mekanisme pemungutan, penggunaan teknologi, serta peran partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, seperti kurangnya sinergi antar OPD, kendala regulasi, dan minimnya kesadaran wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyajikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan efektivitas implementasi strategi PAD di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Strategi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Siyasah Tanfidziyah, Brebes.

ABSTRACT

Brebes Regency, as one of the autonomous regions in Central Java Province, possesses diverse natural and economic resources. However, the optimization of these potentials has become crucial in the effort to sustainably increase Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). A high dependence on central government transfers may limit the region's fiscal flexibility in responding to dynamic development needs and evolving public aspirations. Therefore, the Regional Government of Brebes Regency recognizes the importance of formulating and implementing effective strategies to enhance PAD. As part of a comprehensive and targeted regional development planning framework, the Brebes Regency Government has enacted Regent Regulation (Peraturan Bupati/Perbup) No. 18 of 2022 concerning the Regional Development Plan (Rencana Pembangunan Daerah/RPD) for the years 2023–2026.

This study is categorized as empirical research employing a qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with relevant stakeholders in the Brebes Regency Government, including the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), revenue-generating Regional Apparatus Organizations (OPD), as well as through observation and document analysis of planning documents and implementation reports. Data analysis was carried out using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques.

The research aims to identify key factors that influence the successful implementation of PAD enhancement strategies, including the intensification and extensification of revenue sources, efficiency in collection mechanisms, the use of technology, and the role of community and business actor participation. Furthermore, the study outlines various obstacles and challenges encountered during implementation, such as a lack of synergy among OPDs, regulatory constraints, and low taxpayer awareness. Based on these findings, the study presents constructive recommendations for the Brebes Regency Government to improve the effectiveness of future PAD strategy implementation. Consequently, this research contributes to efforts toward achieving regional fiscal independence and supports the realization of sustainable development for the welfare of the community.

Keywords: *Strategy Implementation, Regional Original Revenue (PAD), Siyasa Tanfidziyah, Brebes.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mahendra Kusuma Wardana

Nomor Induk Mahasiswa : 20103070023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BREBES DALAM PERBUP BREBES NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-
2026”**

adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Mahendra Kusuma Wardana
NIM. 20103070023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mahendra Kusuma Wardana

NIM : 20103070023

Judul : Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes
Dalam Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-20/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PERBUP BREBES NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHENDRA KUSUMA WARDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070023
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6964c09f3a4a4

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 69648b9ef2413

Penguji I

Miski, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 69646821dff26

Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED



Valid ID: 6965d60c61da7

Yogyakarta, 23 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Sukses adalah proses yang dinikmati dan
dijalani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih untuk Ibu saya tercinta dan Ayah saya, kalian akan selalu menjadi yang terbaik dan segalanya dalam hidup saya, semoga kalian selalu dalam lindungan dan ampunan dari Allah

Amiin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الزَّحَمِ الرَّحِيمِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.” Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026”. Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. M.NUR, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

7. Kepada keluarga tercinta saya ibu dan ayah saya, adik, nenek, semuanya yang selalu mendukung penuh setiap langkah saya.
8. Kepada teman-teman seperjuangan, saya mengucapkan terimakasih telah kebersamai dalam proses ini.
9. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaktepatan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Penyusun,



Mahendra Kusuma Wardana

NIM : 20103070023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II	LANDASAN TEORI.....	26
	A. Teori Efektivitas Kinerja.....	26
	1. Pengertian dan Konsep	26
	2. Metode Kualitatif	32
	B. Siyasaah Tanfidziyah	35
	1. Pengertian dan Konsep	35
	2. Prinsip-prinsip <i>Siyasaah Tanfidziyah</i>	41
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN ASLI	
	DAERAH DALAM PERBUP BREBES No. 18 TAHUN 2022	
	TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	
	TAHUN 2023-2026	46
	A. Sekilas tentang Perbup Brebes nomor 18 tahun 2022	46
	B. Pendapatan Asli Daerah dalam Perbup Brebes nomor 18 tahun	
	2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-	
	2026	47
	C. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Perbup	
	Brebes nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan	
	Daerah Tahun 2023-2026	48
BAB IV	ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN	
	ASLI DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PERBUP	
	BREBES NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA	
	PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026	51
	A. Analisis Teori Efektivitas Kinerja Terhadap Strategi	

Peningkatan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Brebes dalam Perbup Brebes No. 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	51
1) Perspektif Teori Pencapaian Tujuan (<i>Goal Attainment Model</i>)	55
2) Perspektif Teori Sumber Daya Sistem (<i>Systems Resource Model</i>)	59
3) Perspektif Teori Pemangku Kepentingan.....	65
B. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Brebes dalam Perbup Brebes No. 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
CURRICULUM VITAE.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu esensi dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal, yang tercermin dalam kemampuan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi tulang punggung keuangan daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat.¹

Kabupaten Brebes, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang beragam. Namun, optimalisasi potensi tersebut menjadi krusial dalam rangka meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Secara yuridis, muncul masalah hukum berupa adanya celah (gap) antara mandat Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 dengan regulasi teknis di bawahnya yang belum sepenuhnya sinkron, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemungutan beberapa

¹ Adinda Ade Mustami, "Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN", . www.kontan.co.id, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.34 WIB.

objek retribusi baru.² Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat saat ini membatasi ruang gerak fiskal daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.³

Kondisi ini diperparah oleh fakta hukum di lapangan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta belum optimalnya sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah turunannya. Terdapat disparitas antara target penerimaan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dengan realisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menyadari pentingnya merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat untuk menjamin peningkatan PAD.⁴

Sebagai wujud perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terarah, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Perbup ini memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya strategi untuk meningkatkan PAD. Keberadaan RPD ini menjadi landasan normatif dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan

² Farrasty adina Mulia. "Analisis sektor unggulan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Brebes". *Journal of Economics Research and Policy Studies*. Vol. 5:1, (February 2025), hlm. 262.

³ Aji Fatwa Kusuma. "Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah". *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2 Issue 2, (Mei 2023): hlm. 225.

⁴ Ghina Khoirunisa Brilliany. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes" *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2024, hlm 1-15.

program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.⁵

Meskipun Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai panduan strategis, implementasi strategi peningkatan PAD di dalamnya memerlukan kajian yang mendalam. Efektivitas implementasi strategi tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Kabupaten Brebes dalam mencapai kemandirian fiskal dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai tantangan dan peluang dapat muncul dalam proses implementasi, mulai dari identifikasi potensi PAD yang optimal, efisiensi mekanisme pemungutan, penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran, hingga partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Studi awal menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD di Kabupaten Brebes telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan retribusi, serta upaya menarik investasi yang diharapkan dapat meningkatkan potensi pajak daerah. Namun, belum terdapat kajian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis bagaimana strategi peningkatan PAD yang tertuang dalam Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 diimplementasikan secara nyata di lapangan. Pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi strategi ini

⁵ “Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN”, *.www.kontan.co.id*, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.34 WIB.

menjadi penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta potensi pengembangan lebih lanjut.⁶

Ketidakefektifan dalam implementasi strategi peningkatan PAD dapat berakibat pada terhambatnya pembangunan daerah, keterbatasan anggaran untuk pelayanan publik, dan rendahnya daya saing daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui analisis yang mendalam terhadap implementasi strategi peningkatan PAD yang tertuang dalam Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya mencapai kemandirian fiskal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026".

Optimalisasi potensi daerah adalah keran bagi daerah untuk mewujudkan kemandirian seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan hal tersebut niscaya kemandirian demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak mustahil tercipta. Namun masalahnya dalam implementasinya masih banyak

⁶ “Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN”, www.kontan.co.id, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.50 WIB.

daerah yang tergantung pada sumber dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁷ Hal tersebut diperparah dengan masih banyaknya daerah yang pengeluarannya terlalu fokus padasektor konsumtif, bahkan data menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang sebagian besar APBD dipergunakan hanya untuk gaji pegawai⁸. Maka dari itu maka pengoptimalan potensi daerah harus direncanakan dan dilaksanakan agar daerah dapat mandiri secara finansial untuk membiayai programnya secara mandiri.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena adanya masa transisi pemerintahan di Kabupaten Brebes yang mengharuskan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan sementara. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen krusial untuk menjamin kemandirian fiskal dan keberlanjutan program pembangunan di tengah fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat. Implementasi Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana strategi yang dirancang mampu mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah secara efektif selama periode transisi tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan serta peluang dalam penerapan strategi peningkatan PAD yang tertuang dalam kebijakan tersebut. Mengingat target pembangunan

⁷ Irma Amanda Hirbasari, “Dampak Pendapatan Daerah dan Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021”, *Jurnal Ilmiah Ultras*, Vol. 5:2 (Mei 2022), hlm, 4.

⁸ Erem Limsan Siregar, “Data mengejutkan Sri Mulyani: 70 % APBD habis untuk PNSPemda”, *www.cnbcindonesia.com*, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.37 WIB.

daerah yang ambisius hingga tahun 2026, ketergantungan pada sektor-sektor pendapatan tertentu memerlukan diversifikasi dan inovasi kebijakan yang nyata. Dengan menganalisis implementasi strategi ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyempurnakan mekanisme pemungutan, pengawasan, dan penggalan potensi sumber daya baru demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan amanat RPD.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dalam perspektif teori Efektivitas Kinerja?
2. Bagaimana implementasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dalam perspektif Siyash Tanfidziyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian yaitu :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 dalam perspektif teori Efektivitas Kinerja.
- b. Menganalisis pemerintah daerah Brebes dalam implementasi strategi kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui rencana pembangunan daerah dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Tata Negara, dan merupakan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Brebes.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis sebagai tambahan informasi referensi dan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan perda yang saat ini berlaku di daerah khususnya masyarakat Kabupaten Brebes.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang ditulis Dinda Dewi Ike lestari pada tahun (2022) yang berjudul “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan”.⁹ Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Skripsi ini membahas tentang

⁹ Dinda Dewi Ike lestari, “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan,” *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, Vol. 3:1 (Mei 2018), hlm, 3.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Peengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan sebagai entitas pengelola keuangan daerah menjadi lokasi fokus penelitian. Hasil persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas pendapatan asli daerah yang akan di optimalisasikan, selain itu perbedaan penelitian ini bertujuan pada pendapatan asli daerah khususnya pada bagian retribusi daerah.

Penelitian yang ditulis oleh Moh. Luffil Hadi pada tahun (2022) yang berjudul "Tinjauan *Maqasid Syariah al-Shariah* Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)".¹⁰ Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* dan kualitatif- deskriptif. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan Retribusi Pasar di pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep dengan tinjauan *Maqasid Syariah*. Hasil persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai retribusi pasar akan tetapi objek penelitian tersebut berfokus di pasar Kalisangka Pulau Kangean Sumenep, selain itu perbedaan lainnya penelitian itu meneliti pemanfaatan retribusi pasar yang ditinjau dari *Maqasid Syariah* sedangkan penelitian ini meninjau dari pengelolaan pelayanan retribusi pasar dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Cholis (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar

¹⁰ Moh. Luffil Hadi, “Tinjauan *Maqasid Syariah al-Shariah* Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep).”Dr.Abid Rohmanu, M.H.I. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022), hlm. 7.

Legi Surakarta”.¹¹ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik penarikan retribusi pedagang pasar dalam tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan, praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah serta sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Akan tetapi ada suatu hal yang tidak berimbang antara hak dan kewajiban dari kedua pihak, khususnya perihal pelayanan kebersihan dan tata parkir. Letak kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas retribusi pasar, namun letak perbedaannya ialah objek penelitian tersebut di pasar Legi Surakarta dan menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes dan menggunakan tinjauan dalam perspektif *siyash tanfidziyah*.

Penelitian yang ditulis oleh Usman Sadik pada tahun (2022) dengan judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur.”¹² Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penerimaan PAD dan Menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan PAD. Letak kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peningkatan PAD, namun letak perbedaannya ialah objek penelitian tersebut di pasar Legi Surakarta dan menggunakan

¹¹ Nur Cholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Di Pasar Legi Surakarta.” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2022), hlm. 8.

¹² Usman Sadik, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur.” Dr. Syamsuddin, SF., Ak., M.Si., CA. Universitas Hasanuddin Makassar (2022). Hlm. 7.

tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes.

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Hari Cahyono pada tahun (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang)”.¹³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, Untuk menganalisis Model Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang. Letak kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peningkatan PAD tetapi perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas kebijakan PAD yang bersumber dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang.

Penelitian yang ditulis oleh Dian Ambarwati pada tahun (2024) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar”.¹⁴ Dalam

¹³ Dwi Hari Cahyono, “Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang)”. Universitas Islam Malang Malang (2020). Hlm. 4.

¹⁴ Dian Ambarwati, “Analisis Implementasi kebijakan E- Rertibusi pasar dalam menin Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar”. Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia (2024). Hlm. 3.

penelitian tersebut menjelaskan tentang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi secara manual & elektronik serta kendala yang dihadapi dalam penerapan e-retribusi. Letak kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peningkatan PAD khususnya pada retribusi tapi perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas kebijakan PAD ebijakan pada E-Retribusi Pasar Dalam Daerah Kabupaten Karanganyar.

Penelitian yang ditulis oleh Meti Kumala Oktasari pada tahun (2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun”.¹⁵ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang implementasi Pasar Madiun mempunyai kebijakan retribusi parkir yang luas belum sepenuhnya optimal, terlihat dari pendapatan retribusi di pasar besar yang tidak mencapai target yang ditentukan. Menurut George C. Edwards III, beberapa indikator kebijakan implementasinya masih harus tepat, termasuk indikator Sumber Daya dan Disposisi. Adanya petugas parkir liar menjadi penyebabnya kendala pelaksanaan parkir kebijakan retribusi, tarif retribusi tidak sesuai dengan yang ditetapkan kebijakan, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor pendukung pelaksanaannya kebijakan retribusi parkir pasar adalah adanya komunikasi dari Departemen

¹⁵ Meti Komala Oktasari, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun”. Insitut Agama Islam (2023). Hlm. 1.

Perdagangan sebagai pelaksana kebijakan ini dengan berkolaborasi dengan antar instansi yaitu Satpol PP, parkir pengelola, dan petugas parkir di tempat tersebut operasi yang dilakukan. Letak kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peningkatan PAD khususnya pada retribusi tetapi perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas kebijakan PAD kebijakan pada retribusi bagian parkir pasar besar di Kota Madiun.

Penelitian yang ditulis oleh Moch Nurilang Permana pada tahun (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Terminal Pasar Antri Baru Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Cimahi”.¹⁶ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 dalam pemunggutan retribusi di terminal pasar antri baru Kota Cimahi. Permasalahan ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 dalam pemunggutan retribusi di terminal pasar antri baru Kota Cimahi serta factor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam mengatasi kendala tersebut. Teori yang digunakan dalam peneltian ini teori implementasi kebijakan, teori retribusi dan teori pemerintah daerah. Letak kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang retribusi daerah tetapi perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas kebijakan pada

¹⁶ Moch Nurling Permana, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Terminal Pasar Antri Baru Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Cimahi”. Universitas Jendral Ahmad Yani (2023). Hlm. 2.

retribusi peraturan Jasa Usaha Di Terminal Pasar Antri Baru.

Penelitian yang ditulis oleh Purniati pada tahun (2021) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu”.¹⁷ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di Daerah yang meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa retribusi parkir meningkatkan sumber pendapatan daerah. Letak kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk pendekatan penelitiannya tetapi perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas kebijakan pada retribusi parkir di Daerah yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu.

Penelitian yang ditulis oleh Difa Zalsyabilla pada tahun (2022) dengan judul “Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar”.¹⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

¹⁷ Purniati, “Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu”. Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia (2021). Hlm. 2.

¹⁸ Difa Zalsyabilla, “Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar”. Universitas Negeri Padang (2022). Hlm.2.

(PAD) Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar. Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, menyesuaikan dengan model implementasi George C. Edward III, diantaranya: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Letak kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas retribusi tetapi perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas Implementasi Program menggunakan aplikasi E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang implelementasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perbup Kabupaten Brebes.

E. Kerangka Teoritik

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan teori efektivitas kinerja dan kemudian dalam kajian hukum Islam menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.

1. Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja, dalam ranah manajemen dan organisasi, melampaui sekadar pelaksanaan tugas atau aktivitas rutin. Secara fundamental, efektivitas kinerja merujuk pada derajat keberhasilan suatu entitas (individu, tim, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan) dalam mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan penekanan pada kualitas hasil dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan yang relevan. Pengertian ini menekankan bahwa kinerja yang efektif tidak hanya diukur dari seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, tetapi lebih pada seberapa baik pekerjaan tersebut berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan target strategis organisasi. Lebih lanjut, efektivitas kinerja juga mengimplikasikan adanya keselarasan antara tindakan yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan, serta kemampuan untuk¹⁹ beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan demi tercapainya tujuan.²⁰

Lebih detail, efektivitas kinerja melibatkan beberapa dimensi krusial. Pertama, pencapaian tujuan (*goal attainment*) menjadi indikator utama, mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan. Kedua, kualitas hasil (*quality of outcomes*) menyoroti bahwa hasil yang efektif harus memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi dan stakeholder. Ketiga, dampak terhadap stakeholder (*stakeholder impact*) menggarisbawahi bahwa kinerja yang efektif harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dan hasil terhadap berbagai pihak berkepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat luas. Keempat, meskipun seringkali dibedakan dengan efisiensi, efektivitas kinerja yang ideal juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara

¹⁹ Richard M. Steers, Lyman W. Porter, & Gregory A. Bigley. *Motivation and Leadership at Work* (6th ed.) McGraw-Hill. (1996).

²⁰ Kimberly S. Cameron. A study of organizational effectiveness, structure, and environment. *Academy of Management Journal*, 29(1), 48-61. (1986).

bijaksana (*resource utilization*), di mana tujuan dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan minimal pemborosan.

2. *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam konteks administrasi negara modern, konsep *Siyasah Tanfidziyah* menawarkan perspektif unik yang menekankan integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam pelaksanaan pemerintahan. Studi-studi dalam jurnal-jurnal seperti *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* dan *Islam and Society* seringkali menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dalam praktik tata kelola pemerintahan, termasuk aspek-aspek seperti kebijakan fiskal, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Meskipun istilah *Siyasah Tanfidziyah* mungkin tidak secara eksplisit digunakan dalam literatur administrasi negara Barat, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti akuntabilitas, efisiensi, dan fokus pada kepentingan publik, memiliki resonansi dengan konsep-konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya relevan dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya diskursus tentang praktik pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara universal.²¹

Lebih mendalam, *Siyasah Tanfidziyah* memiliki beberapa dimensi penting yang membedakannya. Pertama, kepatuhan terhadap syariah

²¹ M. Raihanul Bahraen. Good Governance from Islamic Perspective: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Governance*, 10(1), 77-98. (2021).

menjadi landasan etis dan normatif dalam setiap tindakan pelaksanaan pemerintahan. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan eksekutif harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*) yang diajarkan dalam Islam. Kedua, efisiensi dan efektivitas merupakan prasyarat penting dalam *Siyasah Tanfidziyah*. Pemerintah dituntut untuk menggunakan sumber daya negara secara optimal dan menghasilkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi menjadi pilar penting dalam memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kinerja eksekutif harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, kebijaksanaan dan kearifan (*hikmah*) dalam pengambilan keputusan dan tindakan menjadi ciri khas *Siyasah Tanfidziyah* yang matang, mempertimbangkan berbagai aspek dan potensi konsekuensi dari setiap kebijakan.²²

Dalam konteks implementasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, *Siyasah Tanfidziyah* memegang peranan krusial sebagai landasan operasional dan manajerial bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Lebih dari sekadar menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perbup, *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks ini mencakup

²²Erwin Mahrus & Ahmad Yani. Konsep Kepemimpinan dalam Islam dan Implementasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-15. (2018).

keseluruhan seni dan praktik pelaksanaan kebijakan peningkatan PAD secara efektif dan efisien. Ini melibatkan kemampuan perangkat daerah, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menerjemahkan target PAD ke dalam program kerja yang konkret, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam merancang mekanisme pemungutan dan pengelolaan yang optimal, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD (seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan lain-lain) dalam mengimplementasikan strategi-strategi spesifik di lapangan. Keberhasilan *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks ini sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar OPD, kapasitas aparatur yang memadai, inovasi dalam metode pemungutan, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran, serta kemampuan untuk membangun partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Brebes.²³

Siyasah Tanfidziyah dalam implementasi Perbup Nomor 18 Tahun 2022 juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini berarti bahwa setiap tindakan pelaksanaan strategi peningkatan PAD harus dilandasi oleh akuntabilitas yang jelas dalam penggunaan anggaran dan pencapaian target, transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, partisipasi aktif dari stakeholder terkait, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan efektivitas dalam mencapai tujuan

²³ Erwin Mahrus & Ahmad Yani. Konsep Kepemimpinan dalam Islam dan Implementasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-15. (2018).

peningkatan PAD yang telah ditetapkan dalam Perbup. Sebagai contoh, dalam mengimplementasikan strategi intensifikasi retribusi pasar, *Siyasah Tanfidziyah* yang baik akan memastikan adanya sosialisasi yang jelas kepada pedagang, mekanisme pemungutan yang tidak memberatkan dan transparan, serta penggunaan dana retribusi yang akuntabel untuk peningkatan fasilitas pasar yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks implementasi Perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 bukan hanya sekadar tindakan administratif rutin, melainkan sebuah proses strategis yang memerlukan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan PAD secara signifikan dan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas *Siyasah Tanfidziyah* dalam menerjemahkan visi dan strategi yang tertuang dalam Perbup menjadi tindakan nyata yang memberikan dampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Brebes secara keseluruhan. Analisis terhadap *Siyasah Tanfidziyah* dalam implementasi Perbup ini akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk mencapai tujuan peningkatan PAD yang optimal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendapatkan hasil penelitian yang terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara empiris menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini secara deskriptif akan menggambarkan kondisi pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Brebes. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis secara kualitatif faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan PAD.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait.

Studi ini secara kualitatif akan menganalisis proses pengambilan keputusan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi peningkatan PAD dalam perbup Brebes Nomor 18 Tahun 2022 di Kabupaten Brebes. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut, serta makna yang melekat pada kebijakan tersebut bagi masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan proses wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap narasumber yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

a) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- b) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
- c) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- d) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten BRBEBS No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- g) Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- c. Sumber data sekunder yang digunakan ialah:
 - a) Hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, dan pendapat para pakar hukum/doktrin.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan sejarah dan hal lainnya yang

berkaitan dengan penelitian.²⁴ Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan dan bahan referensi.

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.²⁵ Dalam hal ini dilakukan survey dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (*guided interview*) yaitu wawancara menggunakan pedoman kerja yang sudah disiapkan sebelumnya, yakni pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.

3) *Internet searching*

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori

²⁴ Himat, “*Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

²⁵ Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,” (Malang: Banyu Media Publisng, 2006), hlm. 57.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab seperti berikut :

Pada bab ini membuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti yang meliputi cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang konsep rencana pembangunan daerah, konsep pendapatan asli daerah dengan teori efektivitas kinerja dan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Hal ini dijelaskan sebagai teori pendukung kuat di bagian analisis.

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan mengidentifikasi dan menganalisis strategi peningkatan pendapatan asli daerah pada perbup brebes nomor 18 tahun 2022 dalam perspektif teori efektivitas kinerja.

Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan mengenai hasil analisis dalam penelitian tentang implementasi strategi peningkatan pendapatan asli daerah pada perbup brebes nomor 18 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 dalam perspektif *siyasah*

tanfidziyah.

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian tentang Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Perspektif *siyasah tanfidziyah*, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

1. Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melaksanakan mekanisme dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban sesuai prosedur. Berdasarkan data yang diperoleh Implementasi pengawasan DPRD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan melalui fungsi optimalisasi alokasi APBD, memastikan anggaran yang terkumpul dialokasikan secara strategis pada sektor-sektor kunci seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Mekanisme pengawasan ini sangat intensif dan transparan, dilakukan melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang diselenggarakan rutin dua hingga tiga kali sebulan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mengevaluasi realisasi pendapatan per sektor. Keberhasilan pengawasan ini dinilai sangat efektif, terbukti dari peningkatan PAD yang signifikan dari Rp400 miliar menjadi target Rp790 miliar pada tahun 2025, yang didukung oleh indikator ekonomi seperti peningkatan transaksi jual beli tanah dan kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek

Pajak), serta tingginya kepatuhan wajib pajak. Meskipun menunjukkan efektivitas, DPRD juga menghadapi kendala serius dalam upaya peningkatan PAD, termasuk ketidaktaatan wajib pajak tanah, isu penyalahgunaan dana pajak oleh oknum perangkat desa, dan rendahnya kesadaran perpanjangan pajak kendaraan. Untuk mengatasi hal ini dan menjaga akuntabilitas, DPRD memperkuat fungsi cek *and balance* melalui evaluasi rutin dan peninjauan langsung (sidak) ke lapangan untuk memverifikasi penyaluran dana di semua sektor. Selain itu, DPRD berperan krusial dalam perencanaan jangka panjang dengan menyetujui Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), yang menjadi landasan hukum untuk menarik investor besar (pabrik atau tol) dan mengamankan potensi objek pajak baru di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dirumuskan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi diwujudkan melalui program terukur yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian target PAD.

2. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Brebes perspektif *siyasah tanfidziyah.*, bila dilihat secara umum sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam *siyasah tanfidziyah.* yaitu melaksanakan teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dengan melaksanakan pemasukan daerah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, namun belum secara maksimal melaksanakan prinsip efisiensi pengeluaran sehingga pemasukan dalam hal ini PAD belum mampu mengakomodasi keseluruhan pengeluaran daerah. konsep islam yang selalu mengikuti perkembangan kondisi dituntut mencari sumber pendanaan baru dengan memperhatikan kemashalatan,

kemanfaatan, musyawarah dan partisipasi masyarakat. Konsep daerah kabupaten/kota masih terjebak pada kondisi wewenang dan budaya birokrasi yang menghilangkan elemen inovasi. Namun bukan berarti inovasi tidak ada, namun kurang maksimalnya inovasi dan faktor urusan pemerintahan yang cukup gemuk sehingga daerah mencari jalan tengah dengan mematok target PAD yang tidak begitu signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Konsep urusan pemerintahan daerah untuk dapat disederhanakan sehingga pembangunan dapat fokus pada skala prioritas dan/atau fokus pada urusan pemerintahan inti seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sosial dimana urusan pemerintahan lainnya adalah turunan daripada pelaksanaan urusan pemerintahan inti tersebut.
2. Mulai menggunakan pendekatan baru dalam mencari sumber pendanaan baik berupa pungutan, skema swadaya masyarakat, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau sepenuhnya dari swasta, namun dengan memperhatikan kemaslahatan, kemanfaatan, musyawarah dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi, A. *HAh-Ahkam As-Sultaniyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. (Terjemahan). (2014). Jakarta: Darul Falah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (2018). Sukabumi: CV Jejak.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
- Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," (Malang: Banyu Media Publisng, 2006), hlm. 57.
- Kelsen, H. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris* (Raisul Muttaqien, Terj.). (2011). Bandung: Nusa Media.
- Kimberly S. Cameron. A study of organizational effectiveness, structure, and environment. *Academy of Management Journal*, 29(1), 48-61. (1986).
- M. Raihanul Bahraen. Good Governance from Islamic Perspective: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Governance*, 10(1), 77-98. (2021).
- Murdiyanto, E. "Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)". *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*. (2020). UPN Veteran Yogyakarta.
- Richard M. Steers, Lyman W. Porter, & Gregory A. Bigley. *Motivation and Leadership at Work* (6th ed.) McGraw-Hill. (1996).

B. Jurnal

- Aggraini, dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." (2021). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol 3:3 (Oktober 2021). Hlm. 5.
- Ahmad, M. "Prinsip-Prinsip Dasar Siyasah Tanfidziyah dalam Pemerintahan Islam." (2020). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Islam*, 2(1), 45-60.
- Aji Fatwa Kusuma. "Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah". *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*,

Volume 2 Issue 2, (Mei 2023): Hlm. 225.

- Dian Ambarwati, “Analisis Implementasi kebijakan E- Retribusi pasar dalam menin Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar”. Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Vol. 4:2 (Juni 2024), Hlm. 3.
- Difa Zalsyabilla, “Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar”. Universitas Negeri Padang, Vol. 3:2 (Januari 2022), Hlm. 2.
- Dinda Dewi Ike lestari, “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan,” *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, Vol. 3:1 (Mei 2018), hlm, 3.
- Dwi Hari Cahyono, “Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang)”. Universitas Islam Malang Malang , Vol. 3:1 (April 2020), (2020). Hlm. 4.
- Erwin Mahrus & Ahmad Yani. “Konsep Kepemimpinan dalam Islam dan Implementasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 4:1 (Desember 2018). Hlm. 15.
- Farrasty adina Mulia. “Analisis sektor unggulan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Brebes”. *Journal of Economics Research and Policy Studies*. Vol. 5:1, (February 2025), Hlm. 262.
- Ghina Khoirunisa Brilliany. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes” *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2024, Halaman 1-15.
- Irma Amanda Hirbasari, “Dampak Pendapatan Daerah dan Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021”, *Jurnal Ilmiah Ultras*, Vol. 5:2 (Mei 2022), hlm, 4.
- Kurniawan, A "Perkembangan Lembaga Eksekutif dalam Sejarah Politik Islam: Dari Masa Khulafaur Rasyidin Hingga Abbasiyah". (2020). *Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 5(2).
- Meti Komala Oktasari, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun”. *Insitut Agama Islam* Vol. 3:1 (September 2024), Hlm. 1.
- Moch Nurling Permana, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota

- Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Terminal Pasar Antri Baru Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Cimahi”. Universitas Jendral Ahmad Yani, Vol. 2:1 (Maret 2023), Hlm. 2.
- Moh. Luffil Hadi, “Tinjauan *Maqasid Syariah al-Shariah* Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep).”Dr.Abid Rohmanu, M.H.I. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo , Vol. 5:2 (Januari 2022), hlm. 7.
- Mubarok, N. "Siyasah Tanfidziyah: Struktur dan Wewenang Lembaga Eksekutif dalam Sejarah Islam", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol 1:4 (Oktober 2018). Hlm. 34
- Munawir, A. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Al-Siyasah Al-Syar'iyah terhadap Fungsi Eksekutif di Era Demokrasi". (2021). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Politik Islam*, 6(1)
- Nur Cholis,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Di Pasar Legi Surakarta.”Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta , Vol. 4:1 (Desember 2022), hlm. 8.
- Prasetyo, I., & Benedicta, A. "Analisis Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan". *Jurnal Riset Manajemen*, Vol 2:4 (Maret 2020). Hlm. 7.
- Purniati, “Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu”. Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia, Vol. 4:3 (Juni 2021), Hlm. 2.
- Rizaldi, A. (2021). "Urgensi Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Politik: Analisis Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, 2(1), 30-45.
- Sari, R. P. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 1:4 (Juli 2021). Hlm. 10.
- Setiawan, A., & Budhi, G. S. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja". (2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol 2:3 (Mei 2018). Hlm. 13
- Usman Sadik, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur.” Dr. Syamsuddin, SF.,Ak.,M.Si.,CA. Universitas Hasanuddin Makassar , Vol. 3:3 (Agustus 2022). Hlm. 7.
- Yanti krismayanti. “Implementasi manajemen kinerja dalam meningkatkan

efektivitas kerja di perusahaan multinasional”. Jurnal Cakrawala Akademika (JCA). Vol. 1 No. 3 Oktober 2024, Hlm. 7.

Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (2014). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). "Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami". *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*.

C. Website

Adinda Ade Mustami, “Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN”, .www.kontan.co.id, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.34 WIB wawancara

Erem Limsan Siregar, “Data mengejutkan Sri Mulyani: 70 % APBD habis untuk PNS Pemda”, www.cnbcindonesia.com, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.37 WIB.

Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN”, .www.kontan.co.id, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.34 WIB.

Adinda Ade Mustami, “Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN”, .www.kontan.co.id, diakses pada 26 April 2025 pukul 20.34 WIB wawancara

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, “Profil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024,” <https://dinkominfotik.brebeskab.go.id/data/pad2024>, diakses pada 28 Desember 2025.

D. Perbup

Peraturan Bupati Brebes No. 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Peraturan Bupati Brebes No. 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022. “Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, Hlm. 44.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Tobidin, S.H., M.H. Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Brebes tanggal 15 september 2025

Hasil wawancara dengan Bapak Subandi, S.E., M.Si. Kepala BAPENDA badan pengelolaan pendapatan daerah di Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes tanggal 22 September 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Prasetyo, S.T. Perencana Muda BAPPERIDA (badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah) di kantor di Kantor Kabupaten Brebes tanggal 17 September 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahidi Bidang Aset Daerah di Kantor BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan Aset Dan Daerah Kabupaten Brebes tanggal 18 september 2025